



ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP ASET TETAP DAN EKUITAS PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI RIAU

Tri Priyatmo*

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Jakarta
musttreee@gmail.com

Winarni Rahayu

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Pekanbaru
winarni@gmail.com

Rusdi Akbar

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
rusdi.akbar@ugm.ac.id

*Alamat Korespondensi: musttreee@gmail.com

ABSTRACT

Nearly two decades since the Indonesian government's financial reports began to be prepared in 2004, the government's equity growth ratio has generally experienced a downward trend. This condition also occurs at the regional government level in Riau Province. Asset components, especially fixed assets, strongly influence government equity. Government fixed assets are formed from capital expenditures carried out every year. However, to date, the capital expenditure implemented by the government has not been able to encourage an increase in fixed assets and government equity. This research aims to measure the effect of capital expenditure on local government fixed assets. The analysis uses panel regression data consisting of cross-sectional data from eight districts/cities in Riau Province and time series data for 2015-2021. The data was processed using the E-Views 12 and SPSS 25 applications. The study results concluded that capital expenditure significantly positively influences fixed assets in local governments that have routine land capital expenditure every year. Every Rp. 1 increase in capital expenditure will affect an increase of Rp. 0.64 in local government fixed assets. In contrast, fixed assets are not significantly affected by capital expenditures in local governments, with irregular annual capital expenditures for land. These findings can enrich the literature and provide a new perspective for policymakers to increase government equity through land capital expenditure and improve the quality of fixed asset management, including evaluating fixed asset depreciation policies.

Keywords: Capital Expenditures, Decrease in Equity, Fixed Assets, Local Government

ABSTRAK

Hampir dua dekade sejak laporan keuangan pemerintah Indonesia mulai dibuat pada 2004, rasio pertumbuhan ekuitas pemerintah secara umum mengalami tren penurunan. Kondisi ini juga terjadi di level pemerintah daerah yaitu di Provinsi Riau. Ekuitas pemerintah sangat dipengaruhi komponen aset khususnya aset tetap. Aset tetap pemerintah terbentuk dari belanja modal yang dilaksanakan setiap tahun. Namun, sampai saat ini belanja modal yang dilaksanakan oleh pemerintah belum dapat mendorong kenaikan aset tetap dan ekuitas pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh belanja modal terhadap aset tetap pemerintah daerah. Analisis menggunakan regresi data panel yang terdiri dari data *cross-sectional* dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Riau dan data *time series* tahun 2015-2021. Data diolah dengan aplikasi E-Views 12 dan SPSS 25. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh signifikan positif terhadap aset tetap pada pemerintah daerah yang memiliki belanja modal tanah rutin setiap tahun. Setiap kenaikan Rp1 belanja modal akan berpengaruh kepada kenaikan sebesar Rp0,64 aset tetap pemerintah daerah. Sebaliknya, belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap aset tetap pada pemerintah daerah yang memiliki belanja modal tanah tidak rutin setiap tahun. Temuan ini bisa memperkaya literatur dan memberikan perspektif baru bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan ekuitas pemerintah melalui belanja modal tanah dan meningkatkan kualitas pengelolaan aset tetap, termasuk evaluasi kebijakan penyusutan aset tetap.

Kata kunci: Aset Tetap, Belanja Modal, Pemerintah Daerah, Penurunan Ekuitas

KLASIFIKASI JEL: H72

CARA MENGUTIP:

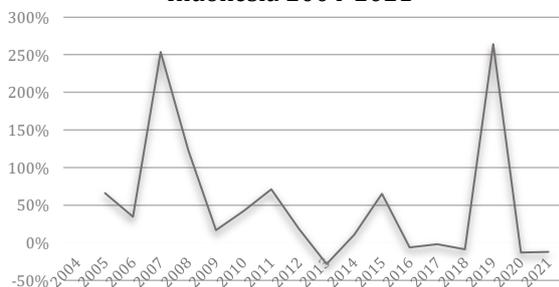
Priyatno, T., Rahayu, W., & Akbar, R. (2024). Analisis pengaruh belanja modal terhadap aset tetap dan ekuitas pemerintah daerah di Provinsi Riau. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 9(2), 156-168.

PENDAHULUAN

Hampir dua dekade sejak laporan keuangan pemerintah Indonesia mulai dibuat pada 2004, rasio pertumbuhan kekayaan bersih atau ekuitas pemerintah secara umum mengalami tren penurunan. Berdasarkan data laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) Indonesia tahun 2004 s.d. 2021 *audited*, pertumbuhan ekuitas pemerintah Indonesia memiliki tren penurunan. Pada tahun 2007 dan 2019 memiliki tren sedikit berbeda dikarenakan nilai aset bersih tahun 2006 minus dan kenaikan aset bersih tahun 2019 senilai Rp4.113 triliun yang merupakan dampak dari kebijakan revaluasi aset oleh pemerintah Indonesia. Detail data tren pertumbuhan ekuitas pemerintah tahun 2004 s.d. 2021 disajikan di Grafik 1.

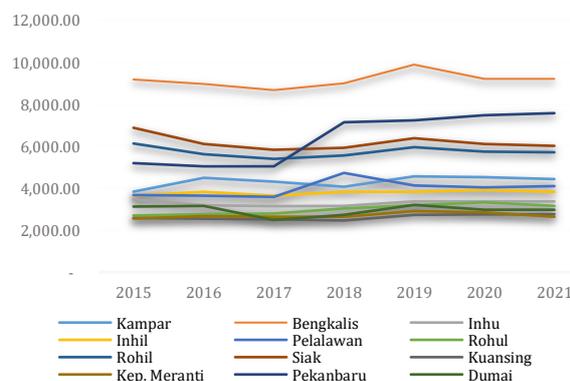
Pada konteks penelitian ini yaitu pemerintah daerah di Provinsi Riau, berdasarkan data laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2015 s.d. 2021 *audited*, sebagian besar ekuitas 12

Grafik 1 Tren Pertumbuhan Ekuitas Pemerintah Indonesia 2004-2021



Sumber: LHP BPK RI atas LKPP

Grafik 2 Tren Ekuitas Pemerintah Daerah di Riau 2015-2021



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD

PENERAPAN DALAM PRAKTIK

- Hasil penelitian ini menyatakan bahwa belanja modal berdampak positif terhadap aset tetap pada pemerintah daerah yang memiliki belanja modal tanah rutin setiap tahun. Sebaliknya, belanja modal tidak berpengaruh terhadap aset tetap pada pemerintah daerah yang memiliki belanja modal tanah tidak rutin setiap tahun.
- Salah satu rekomendasi penelitian ini, pemerintah memiliki alternatif kebijakan untuk meningkatkan kekayaan bersih pemerintah melalui pengalokasian anggaran belanja modal tanah pada APBD dan APBN.
- Di samping itu, diperlukan kebutuhan sistem informasi manajemen aset tetap yang mencakup evaluasi kinerja pengelolaan aset tetap, alokasi aset tetap, pencatatan, dasar pengambilan keputusan, panduan detail penggunaan dan

kabupaten/kotamadya di Provinsi Riau juga mengalami tren *stagnan* dan cenderung menurun (Grafik 2). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022, Provinsi Riau memiliki nilai produk domestik regional bruto (PDRB) tertinggi ke-5 di Indonesia atau ke-1 di luar Jawa. Salah satu unsur penghitungan PDRB adalah nilai pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang sebagian bersumber dari nilai aset tetap pemerintah.

Di dalam laporan keuangan pemerintah, baik LKPP dan LKPD tahun 2021 *audited*, ekuitas pemerintah sangat dipengaruhi oleh komponen aset tetap. Pada LKPP tahun 2021 *audited*, aset tetap memiliki proporsi tertinggi yaitu mencapai 51,9% dari total aset di neraca. Sejalan dengan LKPP, pada LKPD tahun 2021 *audited*, rata-rata proporsi aset tetap 12 kabupaten/ kotamadya di Provinsi Riau mencapai 85,9% dari total aset. Kondisi ini juga terjadi di Rusia, aset tetap memiliki posisi dominan dalam struktur kekayaan nasional Rusia dengan sekitar 70% (Birjukov et al., 2019).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, ekuitas pemerintah merupakan total aset pemerintah dikurangi kewajiban pemerintah. Oleh karena itu, penurunan aset termasuk aset tetap pemerintah dapat menyebabkan penurunan ekuitas pemerintah.

Penurunan ekuitas pemerintah memiliki dampak yang tidak baik bagi suatu negara. Menurut (Marlowe, 2015) tren penurunan rasio

pertumbuhan ekuitas pemerintah mengindikasikan bahwa pemerintah memiliki potensi tidak mampu memenuhi biaya operasional setiap tahun. Menurut *New Keynesian*, rendahnya ekuitas perusahaan non-keuangan dan perbankan merupakan salah satu indikator kemungkinan terjadinya kerapuhan finansial (Schroeder, 2009). Perusahaan dengan ekuitas negatif memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap risiko kebangkrutan (Hindriarsana, 2023).

Dari sisi urgensi aset tetap, penelitian yang dilakukan oleh (Zhong et al., 2017) menyimpulkan bahwa investasi aset tetap secara regresi linier dapat memengaruhi peningkatan produk domestik bruto (PDB) seperti kebijakan yang telah dilakukan pemerintah China. Investasi aset tetap juga merupakan acuan penting bagi pembangunan ekonomi, struktur ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi, serta indikator penting pembangunan ekonomi nasional (Cheng et al., 2021). Penjualan aset tetap juga menjadi salah satu kemungkinan alternatif kebijakan pemerintah dalam mengurangi utang di beberapa negara yang memiliki utang publik besar (Bilan, 2015).

Pada prinsipnya realisasi atas belanja modal akan berdampak kepada peningkatan jumlah aset tetap pemerintah (Halim & Kusufi, 2014; Republik Indonesia, 2010; Syaiful, 2006). Menurut (Bland & Nunn, 1992) belanja modal merupakan belanja variabel, yaitu belanja yang timbul karena dorongan untuk memperoleh dan/atau meningkatkan jumlah aset tetap. Selain itu, pengadaan belanja modal juga dilaksanakan untuk melakukan penggantian aset tetap lama menjadi baru agar terjadi peningkatan produktivitas atau kualitas layanan dari aset tetap tersebut. Oleh karena itu, secara teori seharusnya realisasi belanja modal dapat berdampak kepada bertambahnya total jumlah aset tetap. Namun berdasarkan data LKPP 2004-2021 dan LKPD 2015-2021, belanja modal pemerintah yang dilaksanakan setiap tahun tidak meningkatkan aset tetap dan ekuitas pemerintah.

Penelitian pengaruh belanja modal terhadap aset pemerintah masih sangat terbatas, Misalnya, peneliti melakukan pencarian melalui aplikasi *harzing's publish and perish* dengan data sumber *google scholar*. Pencarian menggunakan kata kunci "belanja modal" dan "*capital expenditure*" dalam kurun waktu sepuluh tahun ini, sehingga diperoleh 1.185 penelitian. Namun, hanya terdapat satu penelitian yang membahas pengaruh belanja modal terhadap aset tetap pemerintah, sebagaimana tercantum pada Grafik 3.

Dari 1.185 penelitian dengan kata kunci "belanja modal" dan "*capital expenditure*" tersebut, hanya terdapat satu penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maulana & Abdullah (2022). Pada

kajian tersebut, peneliti melakukan analisis pada data *cross-sectional* seluruh kabupaten/kota pada pemerintah daerah di Sumatera pada satu periode tahun 2018. Peneliti tersebut menggunakan metode regresi linier sederhana. Salah satu hasilnya mengindikasikan bahwa variabel belanja modal dalam bentuk infrastruktur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel aset tetap infrastruktur.

Penelitian ini mencoba mengurangi *gap* jumlah penelitian yang membahas pengaruh belanja modal terhadap aset tetap yang jumlahnya masih sedikit. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Maulana & Abdullah (2022) menggunakan data *cross-section* di tahun 2018. Penelitian ini kemungkinan merupakan salah satu penelitian perdana yang menganalisis pengaruh belanja modal terhadap aset tetap dengan menggunakan data panel yang dikaitkan dengan penurunan ekuitas pemerintah.

STUDI LITERATUR

Equity Theory

Menurut Van Mourik (2010), teori ekuitas (*equity theory*) merupakan topik jurnal yang populer pada tahun 1930 sampai dengan 1960. Pada awal abad ke-19 saat era revolusi industri pertama di Inggris terdapat hubungan antara pemilik bisnis dengan karyawan dan menggambarkan relasi yang lebih jelas, sehingga menjadi dasar dari teori ekuitas. Teori ekuitas dibedakan menjadi teori kepemilikan (*proprietary theory*), teori entitas (*entity theory*), teori ekuitas residual (*residual theory*), teori *enterprise* (*enterprise theory*), serta teori dana (*fund theory*).

Teori kepemilikan (*proprietary theory*) adalah sebuah teori yang didasarkan pada sudut pandang *proprietor* (pemilik), sehingga tujuan utama dari teori kepemilikan adalah untuk mengukur dan menganalisis kekayaan bersih pemilik yang digambarkan dalam persamaan akuntansi sebagai berikut:

$$\text{Jumlah aset} - \text{Jumlah kewajiban} = \text{Jumlah kepemilikan atau kekayaan bersih.}$$

Pendapatan dapat meningkatkan kepemilikan sedangkan menurunkan beban. Pendapatan bersih (*net profit*) adalah selisih antara pendapatan dan beban yang dibebankan langsung pada pemiliknya. Hal ini mencerminkan peningkatan kekayaan pemiliknya.

Ekuitas Pemerintah

Berdasarkan paragraf 77 lampiran I.01 kerangka konseptual PSAP berbasis akrual, pengertian ekuitas atau kekayaan bersih pemerintah adalah jumlah total aset dikurangi total kewajiban yang dikelola pemerintah pada periode akhir pelaporan. Nilai ekuitas yang tercantum di laporan neraca merupakan nilai total

ekuitas di laporan perubahan ekuitas (LPE). Pada akuntansi akrual, ekuitas hanya disajikan oleh pemerintah pada satu jenis pos ekuitas. Pemerintah menyajikan ekuitas di laporan neraca dan LPE dan memberikan informasi yang cukup pada catatan atas laporan keuangan (CaLK). Ekuitas adalah nilai kekayaan bersih pemerintah disajikan oleh entitas pelaporan yang meliputi ekuitas awal, surplus/defisit periode berjalan, dan perbaikan yang langsung menambah/mengurangi nilai ekuitas. Perbaikan tersebut misalnya disebabkan oleh adanya regulasi baru dan kesalahan penting yang perlu dilakukan perbaikan. Perbaikan kesalahan yang signifikan dan mendasar, misalnya perbaikan kesalahan persediaan yang terjadi pada periode pelaporan sebelumnya dan kebijakan revaluasi aset tetap yang mengakibatkan perubahan nilai aset tetap tersebut.

Setiap entitas pelaporan harus melaporkan secara sistematis dan terstruktur tentang upaya yang dilakukan selama periode pelaporan untuk mengimplementasikan langkah-langkah tersebut dan hasil yang dicapai untuk kepentingan para pembambil keputusan. Hal ini dilakukan untuk membantu pengguna laporan keuangan mengevaluasi kinerja entitas pelaporan selama periode tersebut. Tujuannya adalah untuk dapat memfasilitasi bagian perencanaan, pengelolaan, dan kontrol kepada semua aset, kewajiban, dan

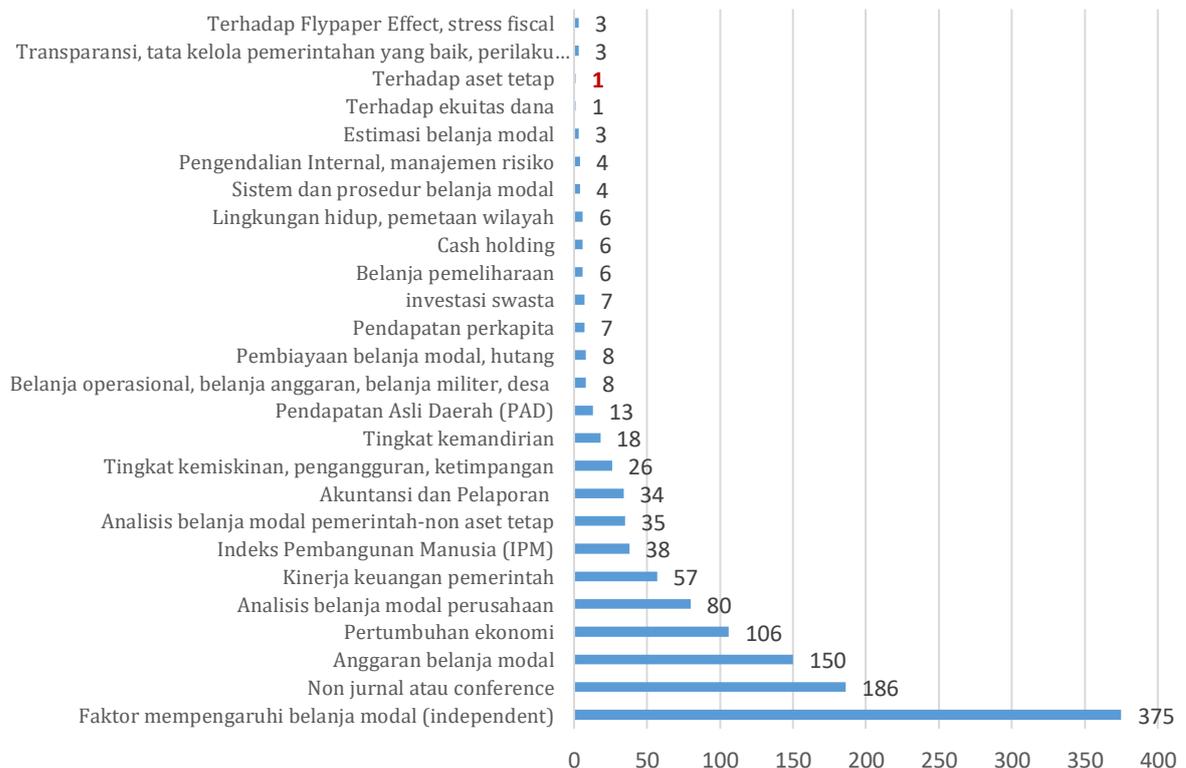
ekuitas pemerintah untuk kepentingan pemilik aset negara yaitu masyarakat umum.

Konsep ekuitas di sektor pemerintah menggunakan pendekatan konsep teori entitas dan teori dana, sedangkan ekuitas di sektor swasta menggunakan pendekatan konsep teori kepemilikan. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 21, ekuitas adalah bagian dari hak pemilik unit bisnis, yaitu nilai aset dikurangi nilai kewajiban dalam neraca dan karenanya tidak diperhitungkan sebagai ukuran nilai jual suatu unit bisnis. Konsepnya, ekuitas merupakan penyertaan modal pemilik dan hasil kinerja operasional dari suatu unit bisnis. Nilai ekuitas menurun dapat disebabkan antara lain pemilik perusahaan menarik investasi modal, keputusan membagi profit, dan terjadinya kerugian usaha. Pada sektor pemerintah, ekuitas bukan merupakan ekuitas pemegang saham/pemilik modal tetapi merupakan ekuitas saldo. Ekuitas dapat memberikan gambaran kondisi kekayaan bersih (*net worth*) pemerintah (Kawatu, 2019).

Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah perkiraan belanja guna mendapatkan aset tetap serta aset lainnya dengan memberikan keuntungan lebih banyak dalam satu periode pelaporan. Belanja yang termasuk belanja modal

Grafik 3 Rekapitulasi Penelitian Kata Kunci Belanja Modal dan *Capital Expenditure*, 2013-2023



Sumber: <https://scholar.google.com>, diolah

adalah belanja modal perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan aset tidak berwujud. Definisi belanja modal sesuai dengan konsep yang disampaikan oleh Halim & Kusufi (2014).

Definisi lain dari belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk membentuk modal, yang pada umumnya menyebabkan bertambahnya aset tetap dengan lama kegunaan lebih banyak dari satu periode pelaporan. Belanja dalam rangka pemeliharaan bertujuan guna menambah kurun waktu pemanfaatan atau mempertahankannya, serta menambah jumlah dan aset yang berkualitas juga merupakan bagian dari belanja modal (Syaiful, 2006).

Sumber alokasi anggaran dari belanja modal dapat berasal dari berbagai sumber dan biasanya untuk proyek-proyek besar menggunakan obligasi, pinjaman, dan hibah. Selain itu, distribusi anggaran belanja modal diberikan berdasarkan kepada tugas utama dari setiap satuan kerja, karena tidak semua satker memiliki pekerjaan atau kegiatan pengadaan aset tetap. Ada satker tertentu yang menyediakan layanan kepada masyarakat dengan pengadaan fasilitas prasarana fisik misalnya aset tetap jalan dan jembatan, irigasi serta jaringan. Sementara satker yang lain menyediakan pelayanan publik dengan memberikan layanan administratif. Sehingga kebijakan menambah alokasi anggaran belanja modal bertujuan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat agar mereka merasa lebih nyaman dengan sarana prasarana/aset tetap yang ada.

Belanja modal dapat dikaitkan dengan kemampuan fiskal suatu daerah. Peningkatan belanja modal berupa pembangunan infrastruktur pelayanan publik dapat diikuti dengan pemungutan retribusi dan pajak atas infrastruktur tersebut. Hal ini pada akhirnya akan menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang berdampak kepada peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi ((Saparmen et al., 2022); Saputra et al., 2021; Wadjudje et al., 2018).

Penelitian lain oleh (Purba, 2019) menyampaikan jika pendapatan per kapita pemerintah daerah Provinsi Riau di 12 kabupaten/kota dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh belanja modal. Namun terdapat analisis lain menyatakan bahwa ketimpangan wilayah tidak dipengaruhi belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau (Alfurqani et al., 2021), dan pertumbuhan ekonomi (Akbar & Maraini, 2021), dan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan masyarakat (IPM) Provinsi Riau (Ernita & Restika, 2021).

Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud dengan masa manfaat ekonomis lebih dari 12 bulan, yang bertujuan untuk memenuhi kegiatan operasional pemerintah atau untuk kepentingan masyarakat umum. Aset tetap dikelompokkan menurut kesamaan sifat atau fungsi dalam operasi unit entitas, baik entitas akuntansi maupun pelaporan. Pengelompokan aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jaringan irigasi, serta aset tetap lainnya (Republik Indonesia, 2010b). Suatu aset berwujud dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap jika memiliki empat karakteristik, yaitu: (1) memiliki umur ekonomis lebih dari 12 bulan, (2) biaya perolehan aset dapat diestimasi secara andal, (3) tidak dimaksudkan untuk dijual, dan (4) diperoleh untuk digunakan. Oleh karena itu, jika suatu barang berwujud pada awalnya diniatkan untuk dialihkan kepada masyarakat atau pihak lain seharusnya tidak dicantumkan ke dalam pos aset tetap, namun dicantumkan pada pos persediaan. Selain itu, pendaftaran aset tetap sangat andal ketika kepemilikan aset tetap telah diambil alih atau dialihkan dan/atau timbul kepemilikan.

Aset tetap diperoleh dari hasil pelaksanaan belanja modal yang dialokasikan pada APBN atau APBD. Dalam rangka meningkatkan jumlah aset tetap, pemerintah harus mengalokasikan anggaran belanja modal pada APBN/APBD. Jumlah anggaran belanja modal ini harus sesuai dengan keperluan fasilitas untuk kelancaran fungsi pemerintahan maupun fungsi pelayanan kepada masyarakat. Aset tetap dapat berasal dari APBN/APBD dan bukan dari APBN/APBD. Aset tetap dapat diperoleh dari pemberian pihak lain misalnya organisasi donor, pihak swasta, dan kelompok/individu masyarakat. Oleh karena itu, aset tetap pemerintah yang diperoleh dari hibah tidak akan membebani anggaran suatu pemerintah yang menerimanya. Kenaikan jumlah aset tetap suatu pemerintah harus memperhitungkan biaya penggunaan atas aset tetap tersebut, baik beban penyusutan maupun beban pemeliharaan. Hal ini dilakukan agar aset tetap tersebut tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan secara optimal. Biaya pemeliharaan perlu dialokasikan oleh pemerintah secara reguler setiap periode pelaporan.

Menurut Abdullah & Halim (2006) terdapat tiga metode untuk mendapatkan suatu aset tetap yaitu dengan melakukan pembelian, pengadaan sendiri, atau melakukan penukaran aset tetap. Aset tetap yang didapatkan dengan cara pembelian dapat dilakukan baik melalui pembelian secara kontan maupun bertahap, sedangkan aset tetap yang didapatkan dengan cara pengadaan sendiri dapat dilakukan dengan membangun secara mandiri dan pengadaan secara kontraktual. Pelaksanaan untuk mendapatkan aset tetap dengan cara pembelian dan pembuatan diawali

dengan pembebanan belanja modal yang akan mengurangi kas umum negara atau kas umum daerah. Pada sektor publik, metode yang lazim digunakan ialah dengan cara pembelian aset tetap. Pelaksanaan proses pembelian aset tetap oleh pemerintah dapat melalui mekanisme tender yang cukup kompleks dan sering bersinggungan dengan unsur politik.

Selain pembelian dan pengadaan sendiri, aset tetap bisa didapatkan dengan cara pertukaran antar unit pelaporan dengan tetap mengacu kepada regulasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Terdapat beberapa alasan dilakukan pertukaran antara lain (1) terdapat aset tetap yang memiliki kondisi tidak memenuhi dengan peraturan tata ruang kota, (2) terdapat aset tetap yang tidak digunakan secara optimal, (3) merupakan bagian usaha untuk menggabungkan suatu aset tetap yang memiliki lokasi yang terpisah, (4) dalam rangka implementasi program strategis pemerintah, (5) terdapat aset tetap dengan kondisi yang sudah tidak baik, serta (6) pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk melakukan pembelian dan pengadaan aset tetap yang baru.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Aset Tetap

Penelitian Nurhaeni (2016) yang melakukan penelitian data *cross-sectional* terhadap 33 sampel satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) di pemerintah Kota Palu pada satu periode tahun 2014. Penelitian ini membahas pengaruh belanja modal terhadap ekuitas dana. Hasilnya bahwa faktor realisasi belanja modal berpengaruh signifikan kepada besarnya kenaikan ekuitas dana. Namun, data ekuitas dana pada penelitian tersebut masih memakai basis akuntansi *cash toward accrual* sehingga nilai ekuitas dana tidak mencerminkan nilai aset tetap sesungguhnya. Pada konsep *cash toward accrual*, ekuitas dana terdiri dari tiga unsur utama yaitu ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana investasi merupakan nilai selisih antara aset tetap dan kewajiban jangka panjang dimana nilai aset tetap belum diperhitungkan nilai akumulasi penyusutan aset tetap.

Terdapat juga kajian lain yang sedikit bersinggungan dengan belanja modal yang dikaitkan dengan belanja pemeliharaan atas aset tetap. Abdullah & Halim (2006) dalam penelitiannya menganalisis data keuangan tahun 2003 dan 2004 dari 32 pemerintah kabupaten/kota di wilayah Pulau Sumatera. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa belanja modal memiliki hubungan asosiatif yang *robust* terhadap belanja pemeliharaan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa kenaikan nilai aset tetap disebabkan oleh kenaikan belanja modal dengan asumsi bahwa secara total jumlah nilai aset

tetap pemerintah daerah mengalami kenaikan dengan adanya belanja modal dalam satu tahun bersangkutan.

Secara konsep, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sejalan dengan hal itu, menurut (Kawatu, 2019) belanja modal akan berdampak kepada neraca pemerintah pada bagian aset tetap. Oleh karena itu, apabila suatu pemerintah, baik pusat dan daerah melaksanakan belanja modal seharusnya akan menghasilkan aset tetap. Apabila belanja modal tersebut dilakukan setiap tahun, maka nilai aset tetap pemerintah akan terus meningkat. Namun demikian, berdasarkan tren data keuangan, baik LKPP di tingkat nasional maupun LKPD di tingkat pemerintah daerah di Provinsi Riau, pada prakteknya aset tetap dan kekayaan bersih pemerintah mengalami tren *stagnan* dan cenderung menurun.

Berdasarkan konsistensi data realisasi belanja modal tanah, dari delapan pemerintah daerah kabupaten/kotamadya di Provinsi Riau terdapat dua kelompok pemerintah daerah. Kelompok pertama, yaitu empat pemerintah daerah yang memiliki belanja modal tanah rutin setiap tahun, sedangkan kelompok kedua yaitu empat pemerintah daerah yang memiliki belanja modal tanah tidak rutin setiap tahun. Masing-masing kelompok pemerintah daerah tersebut dianalisis secara terpisah melalui tahapan metode yang sama, selanjutnya hasil keduanya akan dibandingkan.

Selain itu, dari sisi literatur akademis, penelitian yang membahas pengaruh belanja modal terhadap aset tetap pemerintah daerah masih terbatas. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menentukan hipotesis, yaitu:

- H1: Belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap aset tetap pada pemerintah daerah yang memiliki belanja modal tanah rutin setiap tahun.
- H2: Belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap aset tetap pada pemerintah daerah yang memiliki belanja modal tanah tidak rutin setiap tahun.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan analisis kuantitatif. Salah satu ciri penelitian dengan metode kuantitatif adalah dengan menggunakan statistik. Pengujian dilakukan dengan analisis regresi data panel untuk melakukan pengujian hipotesis terkait pengaruh belanja modal terhadap aset tetap pemerintah. Peneliti menggunakan bantuan aplikasi E-Views 12 untuk melakukan analisis regresi data panel tersebut. Variabel yang

digunakan yaitu variabel bebas adalah belanja modal dan variabel terikat adalah aset tetap.

Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis kategori data yang terdiri dari data panel. Data panel yang digunakan merupakan data set yang meliputi dua jenis data, yaitu data set yang sifatnya *time series* dan data set yang sifatnya *cross-sectional*. Data *time series* mencakup data dengan beberapa periode waktu, dimana pada penelitian ini digunakan data dengan periode tahun 2015-2021, sementara data *cross-sectional* mencakup delapan kabupaten/kota di Provinsi Riau terdiri dari empat pemerintah daerah yang memiliki belanja modal tanah rutin setiap tahun dan empat pemerintah daerah yang memiliki belanja modal tanah tidak rutin setiap tahun.

Peneliti hanya menggunakan data empat pemerintah daerah dari delapan pemerintah daerah yang memiliki belanja modal tanah rutin setiap tahun agar perbandingan menjadi setara (*apple to apple*). Dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan data pemerintah Provinsi Riau. Hal ini disebabkan hasil pemeriksaan data *outlier* dengan menggunakan nilai batas *absolute standardizes* lebih dari tiga, terdapat data variabel bebas dan terikat yang *outlier*.

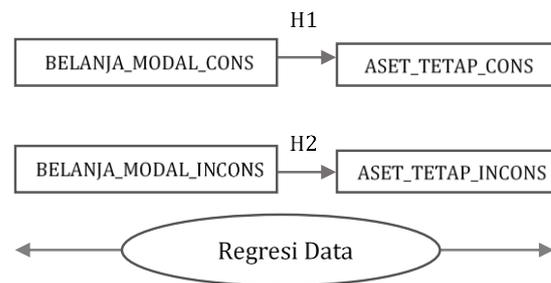
Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data belanja modal dari laporan realisasi anggaran (LRA) dan aset tetap dari laporan neraca yang bersumber dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) atas LKPD delapan pemerintah daerah di Provinsi Riau Tahun 2015-2021.

Metode Analisis Data

Salah satu alternatif model analisis data panel dengan menggunakan pemilihan salah satu dari tiga model analisis yaitu *common effect* model (CEM), *fixed effect* model (FEM), dan *random effect* model (REM). Untuk memilih model analisis data panel yang tepat tersebut, digunakan langkah pengujian model yaitu *chow test*, *hausman test*, dan

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: Maulana & Abdullah (2022); Nurhaeni (2016), Diadaptasi.

lagrange multiplier test (Wahyudi, 2016). Selanjutnya, statistik deskriptif dari data penelitian ini disajikan pada Tabel 1, sedangkan kerangka pemikiran penelitian ini disajikan pada Gambar 1. Berdasarkan hipotesis yang telah dibangun dari variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya, model penelitian akan dirinci menjadi dua persamaan sebagai berikut:

$$ASET_TETAP_CONS_{it} = \beta_0 + \beta_1 BELANJA_MODAL_CONS_{it} + \text{eit} \dots\dots\dots \text{Model 1}$$

$$ASET_TETAP_INCONS_{it} = \beta_0 + \beta_1 BELANJA_MODAL_INCONS_{it} + \text{eit} \dots\dots\dots \text{Model 2}$$

Keterangan:

ASET_TETAP_CONS = Aset tetap pemerintah daerah yang memiliki belanja modal tanah rutin setiap tahun

ASET_TETAP_INCONS = Aset tetap pemerintah daerah yang memiliki belanja modal tanah tidak rutin setiap tahun

BELANJA_MODAL_CONS = Belanja modal tanah pemerintah daerah yang rutin setiap tahun

BELANJA_MODAL_INCONS = Belanja modal tanah pemerintah daerah yang tidak rutin setiap tahun

β_0 = *intercept*

β_1 = koefisien variabel bebas

i = Pemerintah daerah kabupaten/kotamadya

t = tahun

Tabel 1 Analisis Deskriptif

I. Pemerintah daerah yang memiliki belanja modal tanah konsisten:					
Variable	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std. Dev.
ASET_TETAP_CONS	6.014,88	5.468,13	8.588,66	4.248,63	1.415,67
BELANJA_MODAL_CONS	546,21	433,17	1.815,70	179,48	354,03
OBSERVATIONS	28				
II. Pemerintah daerah yang memiliki belanja modal tanah tidak konsisten:					
Variable	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std. Dev.
ASET_TETAP_INCONS	2989,99	2839,97	4279,49	2017,84	533,17
BELANJA_MODAL_INCONS	270,99	255,61	578,99	104,19	101,93
OBSERVATIONS	56				

Sumber: Aplikasi E-Views 12, Diolah Penulis

$e = \text{residual error}$

Pemilihan Model Regresi

Untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel yang telah diuraikan sebelumnya, akan digunakan analisis model regresi data panel. Dalam analisis dengan regresi data panel, terdapat tiga estimasi model yang dapat digunakan yaitu CEM, FEM, dan REM. Untuk menentukan model regresi mana yang selanjutnya akan dipakai, maka akan dilakukan serangkaian uji seperti *chow test*, *hausman test*, dan *lagrange multiplier test*.

Uji Asumsi Klasik

Setelah ditentukan model yang digunakan maka dilakukan uji asumsi klasik dengan melakukan pengujian normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, multikolinearitas, serta autokorelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL

Untuk menentukan model analisis data panel yang tepat, baik kelompok data pemerintah daerah yang memiliki belanja modal tanah rutin setiap tahun maupun kelompok data pemerintah daerah yang memiliki belanja modal tanah tidak rutin setiap tahun, hasil proses pemilihan model memiliki hasil yang sama, sebagaimana disajikan seperti Tabel 2. Dalam rangka uji kebaikan model, peneliti menggunakan aplikasi SPSS 25 untuk melakukan uji normalitas dengan nilai *jarque-bera*. Berdasarkan hasil analisis untuk kelompok data pemerintah daerah yang memiliki belanja modal tanah rutin setiap tahun, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,4268 atau lebih besar dari 0,05, sehingga disimpulkan model ini berdistribusi normal. Berikutnya, analisis untuk kelompok data pemerintah daerah yang memiliki belanja modal tanah tidak rutin setiap tahun menghasilkan probabilitas dari *jarque-bera* senilai 0,8270 atau di atas dari 0,05 sehingga dapat diputuskan bahwa model ini memiliki distribusi sumber data yang normal.

Uji heteroskedastisitas tidak dilakukan karena dalam analisis FEM ini sudah menggunakan *cross-sectional weights* sehingga diasumsikan model sudah terbebas dari heteroskedastisitas. Multikolinearitas tidak dilakukan karena hanya

menggunakan satu variabel bebas, sedangkan untuk uji autokorelasi tidak wajib dilakukan (Siahaan & Ariutama, 2021).

Uji hipotesis pada penelitian ini bersifat parsial karena hanya terdiri dari satu variabel *bebas* sehingga hipotesis yang dilakukan ialah dengan melihat nilai *p-statistic* untuk mengetahui korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat. Sementara itu untuk menentukan ketepatan model diukur berdasarkan nilai koefisien determinasi (*R-squared*). Rekapitulasi hasil analisis regresi data panel melalui aplikasi *E-Views 12* disajikan pada Tabel 3 untuk pemerintah daerah yang memiliki belanja modal tanah rutin setiap tahun dan Tabel 4 untuk pemerintah daerah yang memiliki belanja modal tanah tidak rutin setiap tahun.

H1: Belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap aset tetap pada pemerintah daerah yang memiliki belanja modal tanah rutin setiap tahun.

$$\text{ASET_TETAP_CONS}_{it} = 5,66 + 0,6460\text{BELANJA_MODAL_CONS}_{it} + \text{eit}$$

H2: Belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap aset tetap pada pemerintah daerah yang memiliki belanja modal tanah tidak rutin setiap tahun.

$$\text{ASET_TETAP}_{it} = 3,59 - 0,6704\text{BELANJA_MODAL_INCONS}_{it} + \text{eit}$$

PEMBAHASAN

Pengaruh belanja modal terhadap aset tetap pada pemerintah daerah yang memiliki belanja modal tanah rutin setiap tahun

Nilai *R-squared* sebesar 0,9305 dapat diartikan bahwa variabel bebas belanja modal pada penelitian ini mampu mendeskripsikan variabel terikat aset tetap sebesar 93,05%. Nilai *p-statistic* sebesar 0,0460 atau lebih kecil dari kriteria nilai probabilitas yang telah ditentukan yaitu 5% atau 0,05. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dinyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap aset tetap pada pemerintah daerah yang memiliki belanja modal tanah rutin setiap tahun. Koefisien *BELANJA_MODAL_CONS* senilai 0,646055 dapat dinyatakan bahwa untuk setiap kenaikan Rp1

Tabel 2 Pemilihan Model

Uji	Hipotesis	Pengujian Model	Keterangan
<i>Chow-test</i>	H0 = CEM H1 = FEM	Prob. = 0,000 atau kurang dari 5% H0 ditolak, H1 diterima.	FEM lebih baik dari pada CEM.
<i>Hausman-test</i>	H0 = REM H1 = FEM	Prob. = 0,000 atau kurang dari 5% H0 ditolak, H1 diterima.	FEM lebih baik dari pada REM.
<i>Lagrange Multiplier-test</i>	Tidak perlu dilakukan.		FEM menjadi model yang dipilih.

Sumber: Aplikasi *E-Views 12*, Diolah Penulis

Tabel 3 Hasil Regresi Data Panel
Pemerintah Daerah yang Memiliki Belanja Modal Tanah Rutin Setiap Tahun

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.66E+12	1.79E+11	31.61018	0.0000
BELANJA_ASET_TETAP	0.646055	0.306287	2.109314	0.0460
Root MSE	6.36E+11	<i>R-squared</i>		0.930554
Mean dependent var	1.10E+13	<i>Adjusted R-squared</i>		0.918476
S.D. dependent var	5.78E+12	<i>S.E. of regression</i>		7.02E+11
Sum squared resid	1.13E+25	<i>F-statistic</i>		77.04786
Durbin-Watson stat	1.243472	<i>Prob(F-statistic)</i>		0.000000
<i>R-squared</i>	0.771087	<i>Mean dependent var</i>		6.01E+12
<i>Sum squared resid</i>	1.24E+25	<i>Durbin-Watson stat</i>		0.698796

Sumber: Aplikasi E-Views 12, Diolah Penulis

Tabel 4 Hasil Regresi Data Panel
Pemerintah Daerah yang Memiliki Belanja Modal Tanah Tidak Rutin Setiap Tahun

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.59E+12	1.36E+11	26.43133	0.0000
BELANJA_ASET_TETAP	-0.670475	0.420525	-1.594375	0.1245
Root MSE	2.19E+11	<i>R-squared</i>		0.803398
Mean dependent var	4.03E+12	<i>Adjusted R-squared</i>		0.769206
S.D. dependent var	1.36E+12	<i>S.E. of regression</i>		2.41E+11
Sum squared resid	1.34E+24	<i>F-statistic</i>		23.49689
Durbin-Watson stat	2.142522	<i>Prob(F-statistic)</i>		0.000000
<i>R-squared</i>	0.741196	<i>Mean dependent var</i>		3.38E+12
<i>Sum squared resid</i>	1.42E+24	<i>Durbin-Watson stat</i>		2.405170

Sumber: Aplikasi E-Views 12, Diolah Penulis

belanja modal akan berpengaruh kepada kenaikan aset tetap pemerintah daerah senilai Rp0,64.

Hasil analisis kajian ini sejalan dengan penelitian Maulana & Abdullah (2022) yang menyatakan bahwa belanja modal berjenis infrastruktur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap aset tetap berbentuk infrastruktur, meskipun dengan data sedikit berbeda yaitu tidak menggunakan data *panel* tetapi data *cross-sectional*. Hasil regresi data panel atas hipotesis satu (H1) pada penelitian ini memberikan perspektif baru bagaimana pentingnya belanja modal tanah terhadap peningkatan ekuitas pemerintah. Namun, dengan syarat bahwa hal itu harus dilakukan secara reguler setiap tahun. Pada konteks pada penelitian ini, sebagian besar pemerintah daerah belum melaksanakan kebijakan tersebut.

Pada pemerintah daerah yang memiliki belanja modal tanah tidak rutin setiap tahun

Nilai *R-squared* sebesar 0,8033 dapat diartikan bahwa variabel terikat aset tetap dalam penelitian ini mampu dideskripsikan oleh variabel bebas belanja modal sebesar 80,33%. Nilai *p-statistic* sebesar 0,4524 atau lebih besar dari kriteria nilai probabilitas yang telah ditentukan yaitu 5% (0,05). Berdasarkan hasil analisis

tersebut, dapat dinyatakan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap aset tetap pada pemerintah daerah yang memiliki belanja modal tanah tidak rutin setiap tahun.

Hal ini kemungkinan terjadi karena belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan nilai aset tetap pemerintah daerah, nilainya tergerus oleh akumulasi penyusutan dari aset tetap. Berdasarkan data LHP BPK RI atas LKPD tahun 2021 *audited*, rata-rata rasio akumulasi penyusutan aset tetap pemerintah daerah kabupaten/kotamadya di Provinsi Riau mencapai 48,5%.

Kondisi ini juga terjadi di Rusia, kenaikan depresiasi aset tetap di semua jenis kegiatan ekonomi utama dari tahun 2005 sampai dengan 2016 adalah sebesar 5,2% dan rasio depresiasi mencapai 48,7% s.d. 55% (Birjukov et al., 2019). Faktor kondisi aset tetap yang kurang baik akan berpengaruh terhadap umur ekonomis aset tetap yang akhirnya akan berdampak kepada besarnya akumulasi penyusutan aset tetap setiap tahun.

Dibutuhkan perbaikan atas kebijakan akuntansi terkait penyusutan aktiva tetap di Indonesia. Pemerintah perlu mengembangkan bentuk dokumen akuntansi baru, misalnya dalam

bentuk kartu inventaris aset tetap. Dokumen ini dapat menyajikan unsur penyusutan aset tetap dan mencatat informasi perubahan setiap unsur penyusutan (masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan) setiap tahun selama masa manfaat aset tetap tersebut. Kebijakan penghitungan ulang sejumlah indikator yang memengaruhi unsur-unsur penyusutan aset tetap ini dilaksanakan oleh pemerintah Rusia mulai tahun 2022 (Zaslavskaya, 2022).

Manajemen Aset Tetap Tanah

Berdasarkan analisis regresi data panel pada penelitian ini, dihasilkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap aset tetap pada pemerintah daerah yang memiliki realisasi belanja modal tanah rutin setiap tahun. Hasil analisis ini dapat menjadi dasar bagi pengambil kebijakan, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pengalokasian anggaran belanja modal tanah secara rutin setiap tahun. Di samping itu, terdapat kebutuhan untuk membuat sistem manajemen aset tetap yang dapat mengoptimalkan aset tetap sehingga dapat meningkatkan ekuitas pemerintah.

Manajemen aset tetap pemerintah terutama aset gedung, tanah, dan bangunan mulai muncul sebagai bagian khas manajemen publik pada akhir 1980-an di beberapa negara, misalnya Australia, Selandia Baru, dan Inggris, serta di kota-kota terpilih di Amerika Serikat. Manajemen aset tetap juga sudah mulai menjadi perhatian oleh para pengambil kebijakan di pemerintah daerah. Namun demikian, banyak pemerintah daerah bahkan tidak menyadari sepenuhnya aset apa yang mereka miliki atau berapa biaya pengoperasian dan pemeliharaan aset tersebut (Kaganova & Telgarsky, 2018).

Dalam bisnis apa pun, aset tetap merupakan bagian integral dari efisiensi dan pertumbuhan. Rencana belanja modal memiliki arti penting dalam hal profitabilitas bisnis suatu organisasi di masa depan. Oleh karena itu, sumber daya modal, yang bersifat permanen dan aset terpenting dari setiap usaha bisnis harus digunakan secara efisien, sehingga dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang diperlukan untuk kepentingan bisnis. Namun seringkali, aspek pengelolaan aset ini diabaikan dan berujung pada stagnasi (Goel, 2017).

Aset tetap harus dikelola dengan baik oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan kas pemerintah dan menyediakan produk dan layanan kepada publik. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melaksanakan manajemen aset tetap yang meliputi perencanaan aset, pengorganisasian aset, implementasi aset, pengawasan aset, serta akuntabilitas aset (Manafe et al., 2021). Keamanan dan pemeliharaan aset tetap tanah juga harus menjadi perhatian

pemerintah karena berpengaruh terhadap optimalisasi aset tetap tanah tersebut (Wicaksana et al., 2021). Pemerintah dapat melakukan adaptasi dari sistem manajemen aset tetap yaitu *decision rules object-oriented system* (DROOLS) yang dijelaskan oleh (Necula, 2019) dan penggunaan instrumen evaluasi manajemen aset tetap tanah, gedung, dan bangunan (Kaganova & Telgarsky, 2018).

Pengelolaan aset tetap yang efektif dipengaruhi oleh kualitas SDM pengelola aset tetap, sistem informasi manajemen aset, sistem pengendalian internal organisasi pemerintah (Ekayanti et al., 2018). Selain itu, ada kebutuhan untuk membangun sistem pengelolaan aset tetap yang meliputi evaluasi kinerja manajemen aset tetap, alokasi aset tetap, pendaftaran, anti korupsi, dasar pengambilan keputusan, serta panduan detail penggunaan dan pemeliharaan aset tetap (Lu, 2011).

Salah satu contoh konsep sistem informasi manajemen aset tanah dikenalkan yaitu sistem informasi geografis/GIS (Anwar et al., 2020). GIS adalah aplikasi berbasis *website* dan *android* yang dapat mempermudah organisasi atau masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengajukan permintaan penyewaan aset tanah pemerintah daerah yang dilakukan secara *online*.

Zahra (2017) juga memberikan ide alternatif terkait konsep "bank tanah" yang bertujuan untuk mengoptimalkan manfaat dari aset tanah pemerintah dengan tidak mengesampingkan prinsip keadilan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Konsep bank tanah diadaptasi dari praktek di Belanda dan Amerika Serikat. Melihat karakteristik pengelolaan pertanahan di Indonesia, peneliti lebih memilih alternatif adaptasi dari konsep bank tanah di Belanda. Lembaga bank tanah di Belanda yang dimaksud ialah bank tanah milik publik yang dikelola oleh pemerintah.

Pada konteks pemerintah pusat, lembaga yang mungkin adalah dalam bentuk badan layanan umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan dengan melibatkan Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. Lembaga bank tanah tersebut akan melaksanakan tiga tugas utama, yaitu pengumpulan aset tanah, pengelolaan aset tanah, dan distribusi/pemanfaatan tanah, sedangkan di pemerintah daerah dalam bentuk badan layanan umum daerah (BLUD) di bawah kepala daerah melalui Dinas Pertanahan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh signifikan positif terhadap aset tetap pada pemerintah daerah yang memiliki belanja modal tanah rutin setiap tahun. Setiap kenaikan Rp1 belanja modal akan berpengaruh kepada kenaikan aset tetap

pemerintah daerah senilai Rp0,64. Namun sebaliknya, belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap aset tetap pada pemerintah daerah yang memiliki belanja modal tanah tidak rutin setiap tahun. Realisasi belanja modal aset tetap yang dilakukan setiap tahun oleh pemerintah daerah ternyata tidak otomatis dapat meningkatkan nilai aset tetap dan ekuitas pemerintah daerah tersebut. Dibutuhkan konsistensi realisasi belanja modal tanah pada setiap tahun anggaran untuk meningkatkan nilai aset tetap dan ekuitas pemerintah daerah.

Temuan penelitian ini menjadi sangat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan, bahwa ini merupakan salah satu alternatif solusi untuk meningkatkan kekayaan bersih atau ekuitas pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah dapat mengambil kebijakan untuk mengalokasikan anggaran belanja modal tanah pada APBD dan APBN secara rutin setiap tahunnya. Selain itu, melihat karakteristik dari aset tetap tanah yang tidak memiliki beban penyusutan, maka penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi beban penyusutan aset tetap harus dilaksanakan secara berkelanjutan di masa depan.

Implikasi akademis, literatur yang membahas pengaruh belanja modal terhadap aset tetap dalam konteks fenomena penurunan ekuitas pemerintah masih terbatas di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian dengan topik ini melalui metode kuantitatif, kualitatif dan campuran (*mixed methods*) perlu dilakukan untuk memperkaya literatur dan dasar pengambilan kebijakan. Selain itu, penelitian ini memiliki keterbatasan hanya menggunakan data panel pemerintah daerah kabupaten/kotamadya di Provinsi Riau. Penelitian berikutnya dengan ruang lingkup pemerintah daerah kabupaten/kotamadya di provinsi lain atau pemerintah daerah seluruh Indonesia, akan menambah pengetahuan bagaimana pengaruh belanja modal terhadap aset tetap dan kekayaan bersih pemerintah.

PENGHARGAAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau Periode Tahun 2021-2023, Bapak Ismed Saputra, yang telah berkontribusi melakukan diskusi, mereviu, dan memberikan saran perbaikan atas penelitian ini. Penulis juga menyatakan dengan penuh tanggung jawab atas proses analisis, hasil, dan peluang terjadinya kesalahan di kajian ini.

REFERENSI

Abdullah, S., & Halim, A. (2006). Studi atas belanja modal pada anggaran pemerintah daerah dalam hubungannya dengan belanja pemeliharaan dan sumber pendapatan. *SSRN*

- Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2168571>
- Akbar, Y. R., & Maraini, M. (2021). The role of good governance in economic growth: Mediated by regional financial performance and capital expenditure allocation. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 2(3), 194–208. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v2i3.277>
- Alfurqani, Z. H., Widiarsih, D., & Alagusri, J. (2021). Pengaruh dana alokasi umum, belanja modal dan investasi terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Riau. *ECOUNTBIS: Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 295–307.
- Anwar, T., Bangkit, J. P., & Laksono, A. (2020). Sistem Informasi Geografis Pemanfaatan Aset Tanah Daerah Di Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kabupaten Purbalingga. *MATRIK: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika Dan Rekayasa Komputer*, 19(2), 321–328. <https://doi.org/10.30812/matrik.v19i2.514>
- Bilan, I. (2015). An evaluation of the sale of public assets as alternative public dept reduction strategy in European Countries. *European Integration - Realities and Perspective Proceedings*.
- Birjukov, A., Dobryshkin, E., Kravchenko, I., & Glinskiy, M. (2019, May 22). *Optimization of management decisions for choosing the strategy of enterprises fixed assets reproduction*. <https://doi.org/10.22616/ERDev2019.18.N505>
- Bland, R. L., & Nunn, S. (1992). The impact of capital spending on municipal operating budgets. *Public Budgeting & Finance*, 12(2), 32–47. <https://doi.org/10.1111/1540-5850.00936>
- Cheng, T., Chen, G., Zhang, Z., & Jiang, F. (2021). Analysis of the regional differences between fixed assets investment and China's economic growth from the perspective of functional data. *MATEC Web of Conferences*, 336, 09023. <https://doi.org/10.1051/mateconf/202133609023>
- Ekayanti, S. M., Rifa, A., & Irwan, M. (2018). Determinants effectiveness fixed asset management of District Government on the Island of Lombok. *International Journal of Business Management and Economic Research (IJBMER)*, 9(1), 1219–1229.
- Ernita, D. & Restika, E. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Riau tahun 2010-2020. *AGREGATE*, 4(2), 54–70.
- Goel, S. (2017). Fixed assets management of Larsen & Toubro: stability vs stagnancy.

- Emerald Emerging Markets Case Studies*, 7(4), 1–23. <https://doi.org/10.1108/EEMCS-02-2017-0023>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.
- Hindriarsana, A. Y. (2023). Analisis resiko kebangkrutan pada perusahaan dengan laporan ekuitas negatif. *Syntax Idea*, 5(2), 175. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i2.2132>
- Kaganova, O., & Telgarsky, J. (2018). Management of Capital Assets by Local Governments: an Assessment and Benchmarking Survey. *International Journal of Strategic Property Management*, 22(2), 143–156. <https://doi.org/10.3846/ijspm.2018.445>
- Kawatu, F. S. (2019). *Analisis laporan keuangan sektor publik*. Deepublish.
- Lu, Y. (2011). *Public asset management: Empirical evidence from the state governments in the United States*.
- Manafe, J. S. P., Djaha, A. S. A., & Rozari, P. E. D. (2021). Fixed Asset Management of Buildings and Structures to Increase Rote Ndao Regency Local Revenue Through a New Public Management Perspective: A Study at The Department of Culture and Tourism of Rote Ndao Regency, Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 119(11), 129–136. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2021-11.15>
- Marlowe, J. (2015). *Governing guide to financial literacy, volume 2: Managing your jurisdiction's financial health*. Governing Institute.
- Maulana, H., & Abdullah, S. (2022). Pengaruh dana bagi hasil terhadap aset tetap infrastruktur dengan belanja modal infrastruktur sebagai mediasi (studi pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera tahun 2018). *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*.
- Necula, S.-C. (2019). A business rules management system for fixed assets. *Data*, 4(2), 70. <https://doi.org/10.3390/data4020070>
- Nurhaeni, N. (2016). Pengaruh belanja barang dan jasa, dan belanja modal terhadap ekuitas dana (Survei pada satuan kerja perangkat daerah se-Kota Palu). *Katalogis*, 4(4).
- Purba, S. (2019). Pengaruh belanja modal pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pendapatan perkapita pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 3(2).
- Republik Indonesia. (2010a). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. (2010b). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Saparmam, S., Syapsan, S., & Tampubolon, D. (2022). Pengaruh belanja barang dan jasa, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap kapasitas fiskal kabupaten dan kota di Provinsi Riau tahun 2011 - 2020. *EQIEN - JURNAL EKONOMI DAN BISNIS*, 9(1), 70–78.
- Saputra, M. R., Haliah, H., & Indrijawati, A. (2021). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 129–134. <https://doi.org/10.26487/akrual.v14i2.14810>
- Schroeder, S. (2009). Defining and detecting financial fragility: New Zealand's experience. *International Journal of Social Economics*, 36(3), 287–307. <https://doi.org/10.1108/03068290910932765>
- Siahaan, M. R. F. Br., & Ariutama, I. G. A. (2021). The Impact of Regional FTA on Export of Manufactured Goods: The Implementation of Gravity Model in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 13(2), 100. <https://doi.org/10.17977/um002v13i22021p100>
- Syaiful. (2006a). *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).
- Syaiful, S. E. (2006b). Pengertian dan perlakuan akuntansi belanja barang dan belanja modal dalam kaidah akuntansi pemerintah. *Jurnal Akuntansi*.
- van Mourik, C. (2010). The equity theories and financial reporting: An analysis. *Accounting in Europe*, 7(2), 191–211. <https://doi.org/10.1080/17449480.2010.511885>
- Wadjaudje, D. U., Susanti, S., & Pahala, I. (2018). Pengaruh belanja modal, investasi, jumlah wisatawan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 5(2), 105–128.
- Wahyudi, S. T. (2016). *Konsep dan penerapan ekonometrika menggunakan E-Views*. Rajawali Pers.
- Wicaksana, A., Harmono, H., & Yuniarti, S. (2021). Pengaruh inventarisasi aset, penggunaan aset, pengamanan dan pemeliharaan aset terhadap optimalisasi aset tetap tanah pada pemerintah Kabupaten Malang. *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 6(1), 1–14.

-
- Zahra, F. Al. (2017). Gagasan pengaturan bank tanah untuk mewujudkan pengelolaan aset tanah negara yang berkeadilan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 3(2), 92-101. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2017.003.02.2>
- Zaslavskaya, I. (2022). Treatment of the elements of depreciation of fixed assets in the accounting policy. *E3S Web of Conferences*, 363, 01017. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202236301017>
- Zhong, Z.-C., Luo, S.-H., Wang, W.-C., Chen, X.-Y., Wei, Y.-L., & Mo, W.-R. (2017). Analysis on influence of stock of education capital and fixed assets on GDP based on three types of regression model. *EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 13(8). <https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.01040a>